

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Segala kegiatan dan penyelenggaraan operasional Kejaksaan Agung Timor Leste baik administrasi, dan Finansial sebelum tahun 2002 berada di bawah kepemimpinan PBB. Oleh karena itu gedung Kejaksaan Agung sekarang yang ada di Dili dibangun oleh pemerintahan transisi PBB sehingga semua standar bangunan disesuaikan dengan peraturan PBB.

Kemerdekaan Timor Leste direstorasi pada tanggal 20 Mei tahun 2002, dengan pengakuan secara internasional dan menjadi anggota Dewan keamanan PBB yang ke 191, kebebasan penuh yang didapat Timor Leste pada milenium baru ini memberi tantangan tersendiri untuk membangun dirinya, agar bisa sejajar dengan bangsa di sekitarnya, dengan membangun infrastruktur maupun sumberdaya manusia, kantor-kantor pemerintah dan gedung-gedung negara salah satunya kantor Kejaksaan Agung Timor Leste.

Timor Leste setelah didirikan sebagai negara yang baru mendapat pengakuan secara internasional pada tanggal 20 Mei tahun 2002 dalam perjalananya belum memiliki kantor Kejaksaan Agung yang cukup baik untuk mewadahi semua aktivitas yang ada didalamnya, oleh karena itu sudah menjadi alasan kuat untuk membangun kantor Kejaksaan Agung yang baru sesuai dengan peraturan yang di miliki oleh pemerintahan Timor Leste. Dengan menggunakan pendekatan arsitektur post moderen. Salah satu alasan mengapa harus menggunakan pendekatan arsitektur post moderen, dan mengapa harus gedung Kejaksaan Agung Timor Leste, yakni ada 2 alasan

1. Alasan Historis.
2. Alasan Politik.

Di Negara Timor Leste saat ini sudah ada kantor Kejaksaan Agung namun kantor tersebut belum cukup memadai, sehingga pemerintah berinisiatif untuk membangun gedung yang baru.

Kantor Kejaksaan Agung yang ada sekarang berada di desa (*suco*) colmera denagan luasan bangunan **34,55 x 32,00 m²**

Dan tinggi bangunan 2 lantai

Dan lokasi bangunan sekarang berada di area zona perdagangan sehingga.

Besaran ruang dalam yang ada pada kantor Kejaksaan Agung Timor Leste yang sekarang sangat tidak mendukung.

Dilihat dari luas lahannya juga sangat sempit untuk area parkir seakan-akan dipaksakan untuk menampung banyak kendaraan para staf. Hal ini memberi dampak yang kurang nyaman bagi para staf. Di lain segi dapat memberi dampak besar bagi para pengunjung lain yang mempunyai keperluan khususnya di bidang hukum.

Kejaksaan Agung Timor Leste mempunyai 3 bagian penting dalam bidang penuntutan yaitu:

1. Jaksa Agung bidang tindak pidana Umum.
2. Jaksa Agung bidang tindak pidana Khusus.
3. Jaksa Agung bidang tindak pidana Perdata.

Seiring dengan makin kompleksnya permasalahan pelanggaran hukum yang terjadi pada masa sekarang ini, maka dibutuhkan perbaikan kualitas Kejaksaan Agung dari segi sumberdaya manusia dan fasilitas yang baik dari kualitas maupun kuantitas, yang berarti harus diimbangi juga dengan penambahan sarana dan prasarana terutama ruang kerja sebagai akibat bertambahnya sumber daya manusia di lingkungan Kejaksaan Agung. Pemerintah Timor Leste merasa perlu untuk mendukung kemajuan kinerja Kejaksaan Agung di lingkungan pemerintahan, untuk itu pemerintah menindak lanjuti dengan adanya Proyek perencanaan dan perancangan gedung kantor Kejaksaan Agung yang baru.

Untuk memecahkan masalah-masalah diatas arsitektur hadir sebagai salah satu alternatif pilihan. Lewat perencanaan dan perancangan kantor kejaksaan agung dengan pendekatan arsitektur post modern di Kota Dili diharapkan dapat meminimalkan beberapa masalah yang ada diatas dan dapat menciptakan kenyamanan di dalam kantor dimaksud.

1.2 Permasalahan

a. Identifikasi Masalah

Mengacu pada uraian latar belakang maka ada beberapa masalah yang diidentifikasi dalam Perencanaan Kantor Kejaksaan Agung di Timor Leste yaitu:

1. Dimensi dan besaran ruang belum mencukupi kebutuhan bila ditinjau dari fungsi bangunan.
2. Bentuk tampilan bangunan yang ada belum dapat memberikan makna Kantor Kejaksaan Agung.
3. Pola sirkulasi pada ruang luar dan ruang dalam tidak adanya perencanaan yang tepat.
4. Tidak memiliki fungsi secara baik karena tujuan perencanaan awalnya tidak sesuai dengan pemanfaatan bangunan sekarang.
5. Sistem utilitas didalamnya tidak memenuhi standar yang baik sebagai gedung atau kantor.

b. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang dan uraian identifikasi masalah di atas, maka permasalahan yang dihadapi dalam perencanaan kantor Kejaksaan Agung di Timor Leste yaitu;

Bagaimana menampilkan wujud rancangan kantor Kejaksaan Agung *República Demokrática de Timor Leste* dengan penerapan arsitektur kolonial Portugis dalam Post Modern, serta menentukan system ruang dalam dan ruang luar dalam perencanaan dan perancangan bangunan yang memenuhi fungsi sebagai wadah dalam memfasilitasi kegiatan dan aktifitas di dalamnya, Kantor Kejaksaan Agung yang dapat menampung berbagai aktivitas sesuai dengan tuntutan kebutuhan dan fungsi dari bangunan tersebut serta tampilan bangunan yang dapat mengekspresikan arsitektur post modern

1.3 Tujuan dan Sasaran

Untuk mencapai tujuan dan sasaran maka diperlukan suatu perencanaan dan perancangan yang diselaraskan dengan karakter kegiatan perkantoran, serta

prinsip-prinsip perencanaan arsitektur post moderen yang dapat memenuhi fungsi sebagai kantor kejaksaaan agung. Oleh karena itu diharapkan untuk mencapai tujuan dan sasaran sebagai berikut:

a. Tujuan

Adapun tujuan dari studi perencanaan dan Perancangan Kantor Kejaksaan Agung ini yakni terwujudnya suatu konsep perancangan dan desain bangunan perkantoran yang menampung berbagai aktivitas dan kegiatan yang ada di dalamnya sesuai dengan tuntutan kebutuhan dan fungsinya serta dapat mengekspresikan arsitektur post modern.

b. Sasaran

Tersusunnya landasan program perencanaan dan perancangan arsitektur sebagai acuan/pedoman dalam Desain Grafis Arsitektur Untuk Merancang Kantor Kejaksaan Agung Timor Leste.

Agar mencapai tujuan yang optimal, maka sasaran yang ingin di capai yaitu:

- a. Terciptanya bentuk dan tampilan bangunan, letak bangunan dan penataan tapak.
- b. Terciptanya kantor Kejaksaan Agung Timor Leste yang sesuai besaran ruang dan luasan ruang di tinjau dari aspek arsitekturnya terutama aspek dimensi ruang.
- c. Terbentuknya pola penataan sirkulasi ruang luar dan dalam bangunan
- d. Terciptanya sebuah bangunan dengan bahan konstruksi yang kuat dan kokoh.
- e. Terciptanya sebuah bangunan yang ada dengan sistem utilitas yang memadai.

1.4 Ruang Lingkup Dan Batasan Studi

1. Ruang lingkup

Ruang lingkup perencanaan adalah perencanaan kantor Kejaksaan Agung di Timor Leste dengan pendekatan arsitektur post modern.

2. Batasan Studi

Yang menjadi batasan studi dalam perencanaan dan perancangan Kantor Kejaksaan Agung Timor Leste terdiri dari beberapa aspek yang melingkupi aspek arsitektural yaitu:

- a) Pendekatan Arsitektur post moderen terhadap perencanaan dan perancangan Kantor Kejaksaan Agung Timor Leste.
- b) Lingkungan tapak.
- c) Fasilitas utama berupa Gedung Kantor Kejaksaan Agung Timor Leste.
- d) Fasilitas penunjang yang mendukung aktivitas didalamnya.
- e) Pelaku dan aktivitas.

1.5 Metode dan Teknik Pengumpulan Data

1. Metode pengumpulan data

- a. Survei data sekunder, melalui studi literatur.

Melakukan studi literatur untuk mengumpulkan data – data dari berbagai sumber referensi atau acuan yang berkaitan dengan perencanaan, berupa data statistik dan acuan teori lainnya.

- b. Survei data primer, melalui pengamatan langsung ke lapangan, dan wawancara.

1. Studi lapangan

Melakukan pengamatan langsung atau survei lapangan untuk menegetahui kondisi di lapangan yang sebenarnya.

2. Wawancara

Melakukan wawancara dan konsultasi dengan beberapa pihak yang berkompeten, untuk mendapatkann berbagai masukan serta data-data penunjang yang diperlukan dalam perencanaan.

1.6 Teknik Analisis Data

Data-data yang telah terkumpul kemudian dianalisa untuk memperoleh penyelesaian, dengan menggunakan teknik-teknik analisis data yang terdiri atas analisa kualitatif, analisa kuantitatif dan analisa komparatif, yaitu sebagai berikut:

1. Analisa Kualitatif

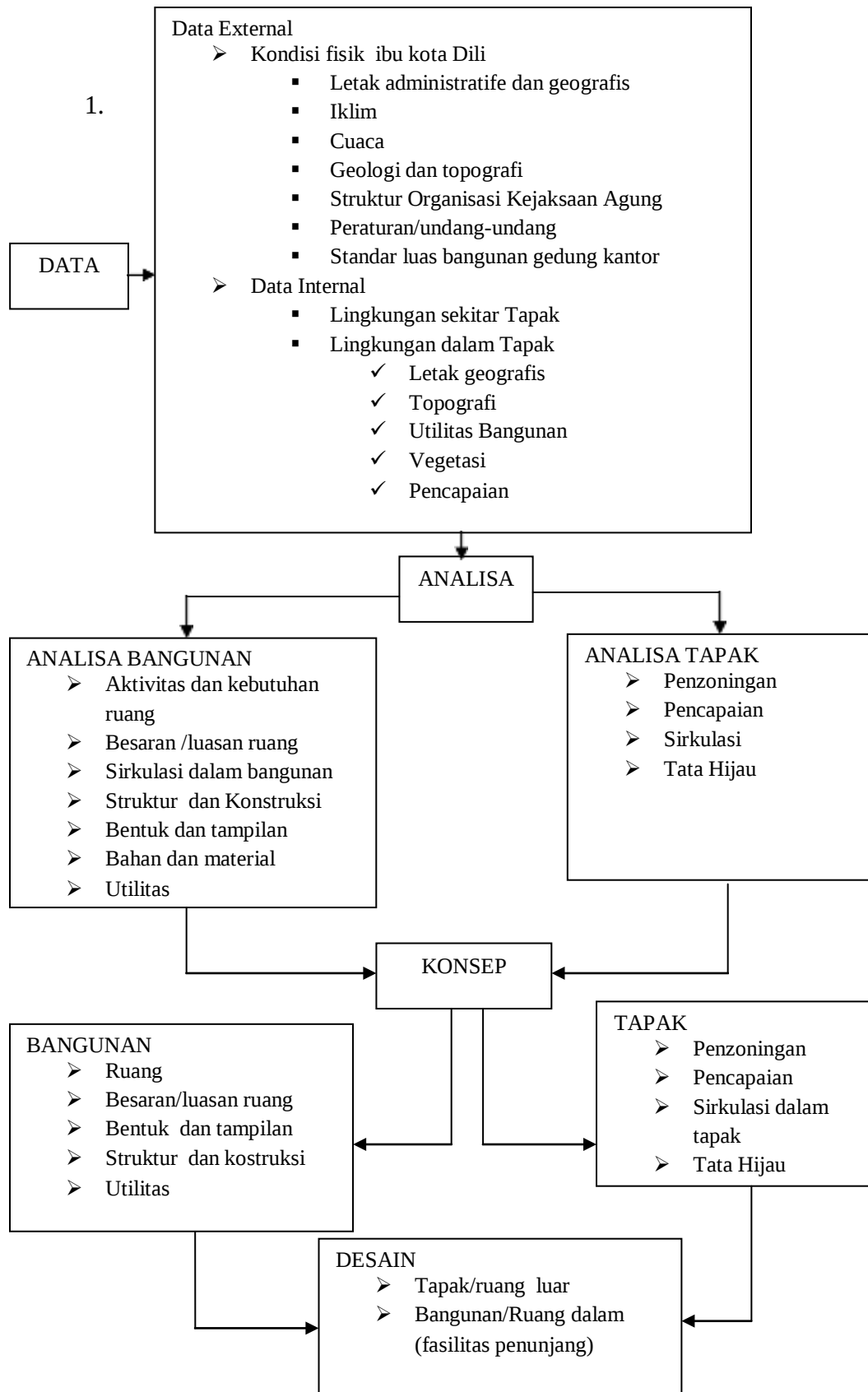
Analisa kualitatif adalah jenis analisis yang di gunakan untuk menghasilkan data deskriptif yang menggunakan pikiran secara logis dalam menganalisis ruang dan bentuk.

2. Analisa Kuantitatif

Analisa kuantitatif adalah jenis analisa yang di gunakan dalam penelitian dengan menggunakan perhitungan dan angka-angka untuk menganalisa ukuran dan standar ruang yang di buktikan secara matematis serta menggunakan analisis komparatif untuk melakukan studi banding terhadap obyek sejenis yang dapat diperoleh melalui media internet guna dijadikan pembandingan dalam proses perencanaan. Data-data yang diperlukan berupa:

1. Struktur organisasi Kejaksaan Agung Timor Leste
2. Standar Luasan bangunan gedung kantor
3. Fasilitas penunjang.

1.7 KERANGKA BERPIKIR



1.8 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan makalah ini adalah sebagai berikut :

1. **BAB I PENDAHULUAN** meliputi: Latarbelakang, Permasalahan, Tujuan dan Sasaran, Ruang lingkup dan Batasan, Metode dan Teknik, Kerangka Berpikir dan Sistematika Penulisan
2. **BAB II LANDASAN TEORI** meliputi: Pemahaman Judul, Pemahaman obyek perencanaan dan perancangan dan pemahaman Tema
3. **BAB III TINJAUAN LOKASI PERENCANAAN** meliputi: Tinjauan umum wilayah perencanaan, Tinjauan khusus Lokasi perencanaan dan Kegiatan yang berkaitan dengan obyek perencanaan
4. **BAB IV ANALISIS PERENCANAAN DAN PERANCANGAN** meliputi: Analisa kelayakan (kapasitas dan proyeksi) Analisa aktivitas dan Flow aktivitas, Analisa Tapak dan Analisa Bangunan
5. **BAB V KONSEP PERENCANAAN DAN PERANCANGAN** meliputi: Konsep Tapak dan Konsep Bangunan.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN.